

KAJIAN EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011

Samsi Haryanto

Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji seberapa jauh kinerja tenaga penyuluh pertanian sesuai dengan program yang telah disusun, dan apakah beban kerja yang dilakukan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta memiliki indeks yang memadai. Penelitian dilakukan terhadap seluruh tenaga penyuluh yang ada baik yang berstatus PNS maupun PHL. Data dikumpulkan melalui pengisian angket dan wawancara, serta dilengkapi dengan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua Petugas Penyuluh Pertanian (PP) telah bekerja sesuai tupoksi dan memiliki beban kerja yang memadai. Dari skor hasil analisis beban kerja diperoleh rincian 71% kinerja PP sangat baik, 15,5%-nya baik, 13,5%-nya cukup baik, dan tak ada yang berprestasi kurang baik. Sementara itu, hampir seluruh PP telah melaksanakan tugas kerja inventarisasi wilayah kerja mereka masing-masing, menyusun program kerja dan laporan kerja. Selain itu, berbagai metode penyuluhan telah pula dilaksanakan oleh sebagian dari mereka, seperti pertemuan dengan tokoh masyarakat, mengadakan mimbar sarasehan, dan pendampingan kemitraan usaha dalam upaya pengembangan produktivitas agribisnis.

Kata Kunci: Petugas Penyuluh Pertanian, Analisis Beban Kerja, Metode Penyuluhan.

PENDAHULUAN

Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam suatu sistem manajemen pelaksanaan suatu program. Oleh sebab itu, setiap tahun dan setiap lima tahun, setiap kantor, dinas, bahkan setiap unit kerja instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi kinerja masing-masing kantor, dinas, dan unit kerja yang bersangkutan dalam upaya mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil yang dicapai dalam melaksanakan suatu program.

Evaluasi kinerja Petugas Penyuluh Pertanian (PP) di Kabupaten Grobogan ini dilakukan, selain dalam rangka ingin mengetahui bagaimana efektivitas hasil kerja yang dicapai selama satu tahun (yakni tahun 2010), juga terutama dilatarbelakangi oleh

anggapan sebagian masyarakat bahkan juga sebagian tokoh masyarakat dan anggota legislatif yang mempertanyakan kinerja PP tersebut.

Oleh karena itulah maka tujuan penelitian ini dilakukan kecuali untuk mengetahui bagaimana kinerja (hasil kerja) yang dicapai oleh masing-masing petugas PP, juga ingin menganalisis apakah beban kerja mereka masing-masing cukup layak atau memadai untuk dikerjakan dalam kurun waktu satu tahun. Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) inilah akan menunjukkan besaran yang dapat dikategorikan beban kerja yang sangat baik (artinya sangat layak sebagai beban kerja sesuai alokasi waktu), baik (layak sesuai alokasi waktu), cukup baik (cukup layak), dan kurang (tidak cukup layak).

Adapun perumusan masalah yang dibahas antara lain: (1) Sejauh mana kinerja PP yang telah dilakukan selama satu tahun (tahun 2010)? Apakah beban kerja mereka masing-masing memadai sebagai “load” kerja selama satu tahun?; (2) Metode penyuluhan yang mana atau metode penyuluhan apa saja yang banyak dilakukan diantara berbagai metode penyuluhan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai pedoman bagi para PP di seluruh Indonesia? Mengapa?.

Sementara hasil yang diharapkan dari penelitian adalah tersusunnya hasil kajian yang memuat: (1) Petunjuk teknik standar penelitian kinerja penyuluh pertanian; (2) Hasil penelitian kinerja PP berdasar pada Analisis Beban Kerja (ABK) masing-masing penyuluh; (3) Rekomendasi bagi para pengambil kebijakan berkaitan dengan Petugas Penyuluh Pertanian (PP).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menentukan populasi para petugas Penyuluh Pertanian (PP) yang pada saat penelitian terdaftar dan aktif bertugas, yakni sejumlah 119 orang, terdiri dari 72 orang berstatus PNS dan 47 orang yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL). Sementara sampel ditentukan semua populasi, jadi bersifat *total sampling*.

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumen, dan angket. Data beban kerja masing-masing petugas diperoleh dari penskoran terhadap jawaban atau isian angket, dihitung dan dianalisis dengan menerapkan peraturan Mendagri No. 12/2008 tentang pedoman ABK di lingkungan Mendagri. Beban kerja diperoleh dari hasil perkalian antara volume kerja dengan norma waktu. Selanjutnya skor Analisis

Beban Kerja (ABK) dihitung dari jumlah skor observasi dibagi jam kerja dalam satu tahun (1300 jam), dan pengkategoriannya adalah sebagai berikut:

Skor ≥ 1	masuk kategori Sangat Baik
0.90 – 0.99	masuk kategori Baik
0.70 – 0.89	masuk kategori Cukup
≤ 0.69	masuk kategori Kurang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pertanian Kabupaten Grobogan

Luas lahan pertanian Kabupaten Grobogan pada tahun 2010 adalah 197.586,420 ha terdiri dari lahan sawah seluas 62.764 ha (31,77%) dan lahan kering seluas 134.822 ha (68,23%). Sedangkan pemanfaatan lahan sawah tersebut dipakai untuk penanaman padi sawah, padi gogo, kedelai, kacang, dan terbesar dipakai untuk tanaman jagung.

Diantara lahan sawah seluas 62.764 ha tersebut terdapat sekitar 10% yang belum terjamin faktor pengairannya (± 6.375 ha), sedangkan sisanya sebagian besar terjamin air melalui irigasi teknis dan tadah hujan.

Sementara itu tipologi wilayah terkait dengan geostrategis Kabupaten Grobogan terdiri dari tipe-tipe daerah: (1) Rawan bencana banjir meliputi 6 kecamatan; (2) Rawan bencana tanah longsor meliputi 4 kecamatan; (3) Rawa kekeringan meliputi 15 kecamatan. Dengan demikian dari 20 kecamatan yang ada, dapat disimpulkan hampir semua kecamatan memiliki kerawanan bencana, satu pihak daerah rawan bencana banjir, sedangkan daerah lain rawan bencana kekeringan. Gambaran kondisi lahan sawah/lahan pertanian beserta tipologi kerawanan bencana di atas menunjukkan betapa rentannya kondisi pertanian. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran optimal dari para petugas penyuluh pertanian. Jumlah penyuluh pertanian yang ada (119 orang pada tahun 2010) tersebut kiranya masih belum memadai terkait dengan kondisi dan tipologi daerah tersebut.

a. Hasil Analisis Beban Kerja

Tabel 1. Status Kepegawaian dan Kategori Beban Kerja (Kinerja) Petugas Penyuluh Pertanian.

No.	Status Kepegawaian Kategori Kinerja	PNS	THL	Total
1.	Sangat Baik	48	36	84
2.	Baik	14	5	19
3.	Cukup	9	5	14
4.	Kurang	1	1	2
	Total	72	47	119

Tabel 1 di atas menunjukkan hal-hal menarik. Dari jumlah 119 orang Penyuluh Pertanian, ada 72 orang berstatus PNS, dan sisanya 47 orang adalah THL. Dari jumlah 72 orang PNS, terdapat 48 orang atau 61% dari total PNS adalah berprestasi sangat baik. Secara keseluruhan yang berprestasi sangat baik yang berasal dari PNS sebesar 40% (48 orang dari 119 orang PP). Sementara itu dari 47 PP berstatus THL terdapat 36 orang berprestasi sangat baik (77% dari total THL). Dilihat dari total petugas PP, maka yang berprestasi sangat baik dari THL sebesar 31% (36 orang dari 119 orang PP).

Tabel di atas menunjukkan tidak adanya perbedaan prestasi antara PNS dan THL, dan sebagian besar dari mereka berprestasi sangat baik. Ada sebagian yang berprestasi baik, dan cukup, dan hanya satu orang untuk masing-masing status kepegawaian yang memiliki prestasi kurang. Itu pun setelah dilakukan penelusuran, disebabkan mereka kurang lengkap dalam mengisi angket.

b. Proporsi Kegiatan yang Dilakukan Terkait dengan Metode Penyuluhan Pertanian

Tabel 2. Prosentase Kinerja dan Jenis Kegiatan/Metode Penyuluhan yang dilakukan.

No.	Prosentase Kinerja	Jenis Kegiatan/Metode Penyuluhan yang Dilakukan
1.	95%	Melakukan inventarisasi data wilayah kerjanya.
2.	98,3%	Menyusun program kerja di wilayah kerjanya.
3.	95%	Membuat laporan kegiatan rutin, per bulan, tri wulan, dan tahunan.
4.	91%	Melakukan kegiatan inventarisasi sarana perlengkapan (Saprodi) dengan memanfaatkan teknologi informasi pasar.
5.	87,6%	Program aksi kunjungan ke rumah petani.
6.	72%	Melakukan diskusi kelompok dengan para petani.
7.	70,2%	Melakukan kegiatan pertemuan dengan tokoh masyarakat.
8.	68,5%	Melakukan mimbar sarasehan dengan kelompok tani.
9.	64,4%	Metode penyuluhan dengan kaji terap di masyarakat.
10.	61%	Melakukan program kerukunan masyarakat.
11.	52,8%	Melaksanakan karya wisata.
12.	52,1%	Melakukan lomba pertanian.
13.	49%	Pengembangan kepemimpinan lewat temu karya atau temu usaha.
14.	49%	Penyebaran brosur.
15.	48%	Pengembangan kreativitas inovasi lewat temu wicara dan temu lapang.
16.	44%	Penyelenggaraan kursus kepada petani.
17.	43%	Pemasangan spanduk.
18.	30,5%	Melakukan temu akrab dengan lingkungan di luar petani.
19.	21,4%	Menyelenggarakan pameran pembangunan produksi pertanian.
20.	20%	Memberi penghargaan prestasi kepada petani.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh responden Petugas Penyuluh Pertanian telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas utama yang mutlak perlu dilakukan oleh setiap petugas dan hal itu sudah dilakukan adalah inventarisasi data wilayah kerjanya masing-masing, menyusun program kerja, dan menyusun laporan kerja, termasuk di dalam kegiatan inventarisasi tersebut adalah inventarisasi Saprodi.

Berbagai macam kegiatan sebagai metode penyuluhan telah dilakukan oleh para PP. Prosentase pada kolom tabel tersebut menunjuk para prosentase jumlah PP yang melaksanakan kegiatan tersebut pada baris itu. Variasinya besaran prosentase pada masing-masing kegiatan menunjukkan bahwa para PP tidak harus melakukan kegiatan yang sama dengan petugas PP lainnya. Mereka memilih jenis kegiatan sebagai metode penyuluhan berdasarkan pada kondisi wilayah kerja, jumlah anggota petani yang menjadi sasaran, dan potensi, serta permasalahan yang saat itu tengah dihadapi oleh para petani. Pada dasarnya dari tabel di atas dapat diketahui bahwa para PP telah melaksanakan metode penyuluhan berdasar pada pedoman peraturan Mendagri No. 12/2008 disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan masalah petani setempat.

Selain kegiatan-kegiatan yang termuat dalam tabel di atas, sesungguhnya masih ada beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh sebagian kecil para PP yang prosentasenya kurang dari 20%. Meski dilakukan oleh jumlah PP yang relatif sedikit (berkisar satu sampai tiga orang petugas), namun patut dicatat bahwa kegiatan-kegiatan dimaksud baik untuk dilakukan, oleh karena menunjukkan adanya kreativitas dari petugas dan kreatif dalam memanfaatkan sarana atau kondisi yang ada. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti pemagangan kepada petani, pemutaran film dokumentasi pembangunan, siaran pedesaan, dan kegiatan obrolan soal bersama para petani.

KESIMPULAN

Beban kerja para petugas penyuluh pertanian Kabupaten Grobogan ternyata cukup memadai dan sangat layak sebagai beban kerja yang wajib dikerjakan selama 1 tahun. Hal ini terbukti pada hasil perhitungan indeks analisis beban kerja, yang hampir semua responden mencapai kategori cukup sampai dengan sangat baik (yakni 117 dari jumlah 119 responden). Hasil demikian sekaligus menjawab anggapan sebagian besar anggota masyarakat dan pejabat yang meragukan tugas mereka.

Berbagai

metode penyuluhan telah diterapkan oleh masing-masing tenaga PP disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan permasalahan pertanian di masing-masing wilayah kerja mereka.

SARAN

Mengingat betapa kompleksnya masalah pertanian di Kabupaten Grobogan, maka disarankan agar di saat mendatang perlu dipikirkan penambahan tenaga PP agar tidak terlalu berat cakupan luas wilayah dan banyaknya petani yang menjadi wilayah tugas para PP. Oleh karena tidak ada perbedaan beban kerja dan kinerja antara PP-PNS dengan PP-THL, maka penambahan tersebut bisa saja tambahan THL, dan jika mungkin tenaga PNS (Capeg).

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Mendagri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Mendagri.
- Peraturan Menpertan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.
- Peraturan Menpertan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian.
- Laporan Penelitian, Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK) Kabupaten Grobogan Tahun 2010, Kerjasama Antara Bagian Organisasi Setda Kabupaten Grobogan dengan PUSLITDESBANGDA LPPM UNS.
- Himpunan Perda, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan, 2008.
- Otonomi Daerah, Juklak Pemerintahan Daerah, Depdagri, 2010.